



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOMUKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

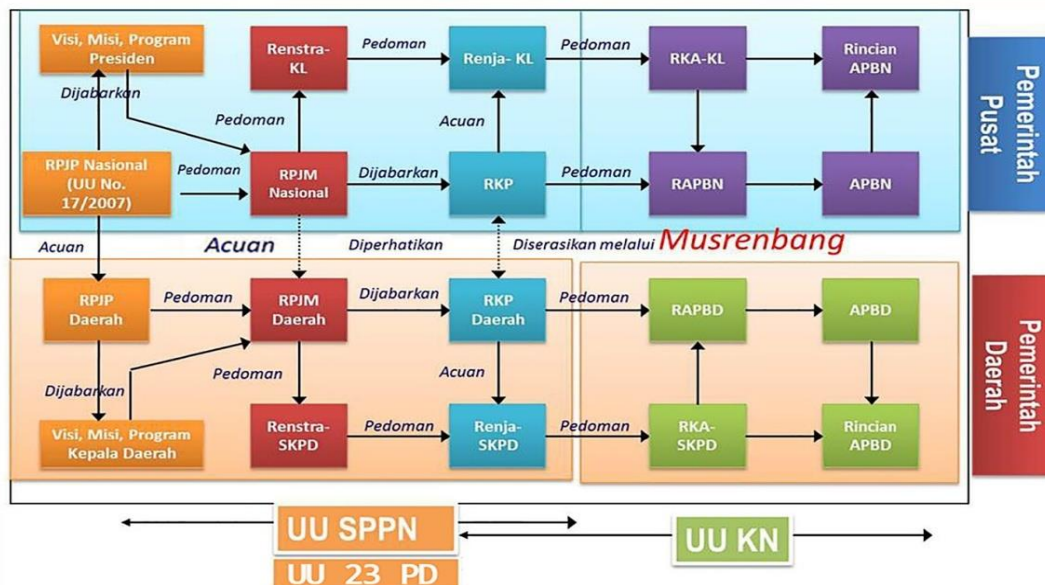
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung tahun 2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 seri E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018–2023;
 21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
 22. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2018-2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah, sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA),
2. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan Pelayanan,
3. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen jangka menengah. Kualitas penyusunan Renja PD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian Renstra PD.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian Renstra PD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari tahapan pencapaian Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada tahun lalu telah menggunakan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022
Kabupaten Belitung
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6x100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4x100)
1		URUSANWAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR								
1	02 10	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16 01	Program : Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100		100	100	100	100	
				%		%	%	%	%	
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75		75	75	100	75	
				%		%	%	%	%	
			Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100		100	100	100	100	
				%		%	%	%	%	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100		100	100	100	100	
				%		%	%	%	%	
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26		6	6	100	10	
				Dok		Dok	Dok		Dok	
		Sub Kegiatan :								
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9		3	3	100	3	
				Dok		Dok	Dok		Dok	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2		-	-	-	1	
				Dok					Dok	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2		-	-	-	1	
				Dok					Dok	

					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	2		-	-	-	1		
							Dok					Dok		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perubahan DPA-SKPD	2		-	-	-	1		
							Dok					Dok		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	9		3	3	100	3		
							Dok		Dok	Dok		Dok		
					Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	10		4	4	100	3		
							Dok		Dok	Dok		Dok		
					Sub Kegiatan :									
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	14		14	14	100	14		
							Bulan		Bulan	Bulan		Bulan		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	2		-	-		1		
							Dok					Dok		
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	8		4	4	100	2		
							Dok		Dok	Dok		Dok		
					Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	34		34	32	94.12	34		
							Orang		Orang	Orang		Orang		
					Sub Kegiatan :									
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PDH	70		-	-	-	35		
							Stel					Stel		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	29		7	3	42.86	11		
							OK		OK	OK		OK		
					Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100		100	100	100	100		
							%		%	%		%		
					Sub Kegiatan :									
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100		100	100	100	100		
							%		%	%		%		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100		100	100	100	100		
							%		%	%		%		

					Kegiatan :	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan nama domain dan sub domain yang dikelola dengan baik	100		80	80	100	100		
								%		%	%		%		
					Sub Kegiatan :										
						Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Nama domain dan penyelenggara sistem elektronik pemerintah daerah	2 Jenis		-	-		2 Jenis		
						Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	-		
						Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jaringan intra pemerintah daerah dan internet	2 Jenis		-	-		2 Jenis		
					Kegiatan :	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Belitung yang dikelola dengan baik	100		80	80	100	100		
								%		%	%		%		
					Sub Kegiatan :										
						Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100	1 Dok		
						Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen Perencanaan SPBE	2 Dok		-	-		1 Dok		
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Layanan Pusat Data dan Informasi	100 %		100 %	100 %	100	100 %		
						Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE	2 Dok		-	-		1 Dok		
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi SPBE	1 Aplikasi		1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	1 Aplikasi		
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 Jenis		-	-		1 Jenis		
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Aplikasi dan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis		

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika 2023

2	20	2		Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase pemanfaatan data statistik daerah	90 %		80 %	80 %	100	90 %		
				Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data Statistik Sektoral	90 %		80 %	80 %	100	90 %		
				Sub Kegiatan :									
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen Statistik Sektoral	9 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok		
					Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peserta Bimtek/Workshop	140 Orang	-	-	-	40 Orang		
2	21	2		Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat kematangan keamanan informasi	Level II+		Level II	Level II	100	Level II		
				Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persandian untuk Pengamanan Informasi	80 %		75 %	75 %	100	75 %		
				Sub Kegiatan :									
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebijakan Pengamanan Informasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	-		
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keamanan Informasi	3 Dokumen	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok		
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Sarana dan Prasarana Keamanan Informasi	9 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	66.67	2 Jenis		
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	6 Jenis	-	-		2 Jenis		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2021 sudah selaras dengan target yang telah ditetapkan di Perubahan Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara teknis dibidang Komunikasi dan Informatika yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

Tolak ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung telah dituangkan di dalam laporan kinerja serta matrik Pengendalian dan Evaluasi sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2021, ini akan menjadi proyeksi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan melalui Renja tahun 2023. Pada pembahasan sub bab ini, perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut tugas dan fungsi PD.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2022	2023	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Pelayanan Terhadap Publik	Layanan Publik	-	3,26	3,4	3,6	3,8	0	3,26	3,24				
2	Persentase Pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	Pelayanan Terhadap OPD, Lembaga,	Layanan Publik Berbasis TIK	81,72%	86,62%	87%	90%	95%	81,72%	86,62%	94,85%				
	a. Terintegrasinya sistem informasi														
	b. Diseminasi informasi														
	c. Pengaduan masyarakat														
	d. Layanan Persandian														
	e. Agregat nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi dengan menggunakan instrumen yang diterapkan BSSN														
	f. Pemanfaatan data														

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung tidak terlepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Perlu adanya tindakan finansial dan non finansial dalam memenuhi kebutuhan publik. Adapun isu-isu yang berkembang yaitu :

1. Ketersediaan SDM, Implementasi e-Government harus terus ditingkatkan dan diarahkan khususnya mencakup pengembangan kompetensi sumberdaya manusia dibidang TIK, Persandian dan Statistik Sektoral.
2. Belum optimalnya Layanan di Bidang TIK, Persandian dan Statistik Sektoral. Pengembangan data pembangunan daerah yang akuntabel dan terintegrasi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal bagi stakeholder pengguna data.
3. Lemahnya kebijakan dibidang TIK, Persandian dan Statistik Sektoral, menjadi tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya pemerintah daerah perlu menyediakan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat. Serta Peranan urusan persandian dalam pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government dan pembentukan ekosistem smart city.
4. Perlu adanya tindakan antisipasi terhadap keadaan luar biasa seperti bencana, krisis ekonomi, pandemi dan lain-lain yang bisa mempengaruhi kinerja dan pembangunan nasional.

Dari hasil identifikasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang Aplikasi Informatika, bidang Informasi Komunikasi Publik dan bidang Keamanan Informasi Persandian dan Statistik, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan Komunikasi dan Informatika yang dapat dikelompokkan menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang harus mendapat perhatian adalah meliputi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, disaster *recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, layanan

keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Program Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, dan
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa untuk mencapai tujuan nasional perlu adanya penguatan di bidang komunikasi dan informatika dengan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Perubahan Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai pada tahun 2023 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah yang dikaitkan dengan target kinerja renstra.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat daerah seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- TUJUAN :

Pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 merumuskan *TUJUAN* sebagai berikut:

“Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Professional, Akuntabel dan transparan “.

- SASARAN :

Untuk **SASARAN** dirumuskan sebagai berikut :

1. Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel,
2. Terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional,
3. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian Visi dan Misi sebagaimana yang ditetapkan di dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung 2018-2023 dengan menetapkan tujuannya yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas”**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran, yaitu **“Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis TIK”**.

Serta untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut di atas, maka strategi dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengoptimalkan Penyelenggaraan TIK.
3. Mengoptimalkan Belitung Satu Data.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023, merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung dan penyusunan perencanaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yaitu :

Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di kabupaten Belitung tahun 2023.

Dan mewujudkan Misi:

Misi Kesatu	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.
Misi Kedua	Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.
Misi Ketiga	Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

- 2) Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goal's* (SDG's). Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2022 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Bagian SDG's yang didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu **Industri, inovasi dan infrastruktur**: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

- 3) Mendukung Pencapaian NSPK dan SPM, Program dan kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). NSPK/SPM yang didukung oleh program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu program aplikasi informatika, program informasi dan komunikasi publik, program penyelenggaraan statistik sektoral dan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- 4) Mendukung pencapaian 16 Program Inovatif kepala daerah yaitu:
 - a) Program **SEHATI**
(Sistem Pelayanan Kesehatan Terintegrasi)
 - b) Program **KEMINANGAN**
(Kearifan Lokal dan Adat Istiadat sebagai Inspirasi Pembangunan)
 - c) Program **KETARAP**
(Keterpaduan Antar Rakyat Antar Pengusaha)
 - d) Program **BAGUK**
(Bagi Bibit Gratis untuk Kampung)
 - e) Program **TUSENA**
(Satu Desa Satu Destinasi setiap 1 tahun yang bersifat desa tematik)
 - f) Program **ILAK**
(Insentif Langsung untuk Kemajuan)
 - g) Program **PUKAT**
(Program Air Bersih untuk Masyarakat)
 - h) Program **PELANDUK**
(Pelayanan Medik untuk Kampung)
 - i) Program **GANGAN**
(Garansi Hasil Panen Komoditi Gabungan)
 - j) Program **BETARE**
(Belitung Terang Benderang)
 - k) Program **SIMPOR**
(Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olah Raga)
 - l) Program **CUHAI**
(CSR untuk Hijau dan Indah)
 - m) Program **BERUAH**
(Pembangunan dan Perbaikan Rumah Ibadah)
 - n) Program **AMBONG**

- (Program Asupan untuk Anak Balita dan Ibu Mengandung)
- o) Program **SOS CENTER**
(Telp ke 505 / Aplikasi Masyarakat Menghubungi SOS Center)
- p) Program **TERINDAK**
(Tanah Teregister, Integrasi dan Akuntabel)
- 5) Mendukung Pencapaian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- 6) Mendukung kantor Serikat Pekerja Nasional (KSPN).
- 7) Mendukung kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja PD Tahun 2023 adalah, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	7 Keg	25 Sub Kegiatan	6.076.291.000
2	Informasi dan Komunikasi Publik	1 Keg	6 Sub Kegiatan	450.715.000
3	Aplikasi Informatika	2 Keg	13 Sub Kegiatan	2.287.765.000
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Keg	4 Sub Kegiatan	362.486.940
5.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1 Keg	3 Sub Kegiatan	138.927.060
	J u m l a h	12 Keg	51 Sub Kegiatan	9.316.185.000

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung merencanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar *Rp.9.316.185.000,00* (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Belitung murni sebesar *Rp.9.316.185.000,00*. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.2

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN BELITUNG**

12) Dinas Komunikasi dan Informatika																
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
2					Urusan	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	16				Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
2	16	01			Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan		100 %	6,076,291,000			100 %	6,345,501,000	
								2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat		75 %						
								3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		100 %						
								4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100 %						
2	16	01	2.01		Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	:	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		10 dok	12,000,000	APBD Kabupaten	10 dok	12,000,000
								Hasil	:	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan		100 %			100 %	
2	16	01	2.01	01	Sub Kegiatan	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	:	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Tanjungpandan	3 Dok	2,000,000	APBD Kabupaten	3 Dok	2,000,000
2	16	01	2.01	02		2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran	:	Dokumen RKA-SKPD	Tanjungpandan	1 Dok	2,000,000	APBD Kabupaten	1 Dok	2,000,000
2	16	01	2.01	03		3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran	:	Dokumen perubahan RKA-SKPD	Tanjungpandan	1 Dok	2,000,000	APBD Kabupaten	1 Dok	2,000,000
2	16	01	2.01	04		4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran	:	Dokumen DPA-SKPD	Tanjungpandan	1 Dok	2,000,000	APBD Kabupaten	1 Dok	2,000,000
2	16	01	2.01	05		5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran	:	Dokumen perubahan DPA-SKPD	Tanjungpandan	1 Dok	2,000,000	APBD Kabupaten	1 Dok	2,000,000
2	16	01	2.01	07		6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	:	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Tanjungpandan	3 Dok	2,000,000	APBD Kabupaten	3 Dok	2,000,000

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

2	16	01	2.02	Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	: Dokumen keuangan perangkat daerah		3 Dok	5,114,000,000	APBD Kabupaten		3 Dok	5,115,000,000	
						Hasil	: Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan		100 %				100 %		
2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	: Gaji dan tunjangan ASN	Tanjungpandan	14 bulan	5,110,000,000	APBD Kabupaten	1 Tahun	5,110,000,000
2	16	01	2.02	05		2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran	: Laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Tanjungpandan	1 Dok	2,000,000	APBD Kabupaten	1 Dok	2,500,000
2	16	01	2.02	08		3.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran	: Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tanjungpandan	2 Dok	2,000,000	APBD Kabupaten	2 Dok	2,500,000
2	16	01	2.05	Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran	: Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah		34 orang	67,500,000	APBD Kabupaten		34 orang	175,831,000	
						Hasil	: Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah		75 %				75 %		
2	16	01	2.05	02	Sub Kegiatan	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran	: PDH	Tanjungpandan	35 Stel	17,500,000	APBD Kabupaten	70 Stel	47,056,000
2	16	01	2.05	09		2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran	: Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Tanjungpandan	11 Orang kali	50,000,000	APBD Kabupaten	15 Orang	128,775,000
2	16	01	2.06	Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	: Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		100 %	341,200,000	APBD Kabupaten		100 %	389,500,000	
						Hasil	: Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah		100 %				100 %		
2	16	01	2.06	01	Sub Kegiatan	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	: Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tanjungpandan	100 %	10,000,000	APBD Kabupaten	100 %	15,000,000
2	16	01	2.06	02		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	: Peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjungpandan	100 %	45,000,000	APBD Kabupaten	100 %	45,000,000
2	16	01	2.06	03		3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran	: Peralatan rumah tangga	Tanjungpandan	100 %	10,000,000	APBD Kabupaten	100 %	10,000,000
2	16	01	2.06	04		4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	: Bahan logistik kantor	Tanjungpandan	100 %	53,700,000	APBD Kabupaten	100 %	70,500,000
2	16	01	2.06	05		5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran	: Barang cetak dan penggandaan	Tanjungpandan	100 %	30,000,000	APBD Kabupaten	100 %	36,000,000
2	16	01	2.06	06		6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran	: Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanjungpandan	100 %	10,000,000	APBD Kabupaten	100 %	13,000,000
2	16	01	2.06	09		7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	: Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	100 %	182,500,000	APBD Kabupaten	100 %	200,000,000

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

2	16	01	2.07	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran	:	Jenis barang milik daerah		4 Jenis	50,000,000	APBD Kabupaten		6 Jenis	78,340,000
							Hasil	:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100 %				100 %	
2	16	01	2.07	06	Sub Kegiatan	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	:	Tanjungpandan		50,000,000	APBD Kabupaten			78,340,000
											3 unit				2 unit	
											3 unit				1 unit	
											2 unit					
											1 unit					
2	16	01	2.08	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	:	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		100 %	317,091,000	APBD Kabupaten		100 %	329,660,000
							Hasil	:	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah		100 %				100 %	
2	16	01	2.08	01	Sub Kegiatan	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	:	Tanjungpandan		1,200,000	APBD Kabupaten		120 lembar	1,200,000
2	16	01	2.08	02		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	:	Tanjungpandan		150,000,000	APBD Kabupaten		12 bulan	163,460,000
2	16	01	2.08	04		3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	:	Tanjungpandan		165,891,000	APBD Kabupaten			165,000,000
											1 orang		APBD Kabupaten		1 orang	
											1 orang		APBD Kabupaten		1 orang	
											2 orang		APBD Kabupaten		2 orang	
											1 orang		APBD Kabupaten		1 orang	
2	16	01	2.09	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	:	Barang milik daerah dalam kondisi baik		4 jenis	174,500,000	APBD Kabupaten		4 jenis	245,170,000
							Hasil	:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100 %				100 %	

2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran :		Tanjungpandan			74,500,000	APBD Kabupaten			74,500,000
								1. Kendaraan perorangan dinas operasional/lapangan roda 4/lebih yang dipelihara		2 unit					2 unit	
								2. Kendaraan perorangan dinas operasional/lapangan roda 2/3 yang		12 unit					12 unit	
2	16	01	2.09	06		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran :	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Tanjungpandan	63 unit		50,000,000	APBD Kabupaten		100 %	49,670,000
2	16	01	2.09	09		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran :	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Tanjungpandan	1 unit		50,000,000	APBD Kabupaten		100 %	121,000,000
2	16	02			Program	: Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang Didiseminasikan		100 %		450,715,000			100 %	1,294,285,000
2	16	02	2.01		Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah		100 %		450,715,000	APBD Kabupaten		100 %	1,294,285,000
							Hasil :	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten		100 %					100 %	
2	16	02	2.01	02	Sub Kegiatan	1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Keluaran :	Opini dan aspirasi masyarakat yang terlayani	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 %		40,000,000	APBD Kabupaten		100 %	58,256,000
2	16	02	2.01	03		2. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Keluaran :	Laporan monitoring agenda prioritas	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Dokumen		35,115,000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	35,115,000
2	16	02	2.01	05		3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Keluaran :	Media komunikasi publik	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik,	6 Jenis		300,000,000	APBD Kabupaten		6 Jenis	833,755,000
2	16	02	2.01	06		4. Pelayanan Informasi Publik	Keluaran :	Layanan informasi publik	Tanjungpandan, Luar Daerah	100 %		25,600,000	APBD Kabupaten		100 %	65,600,000
2	16	02	2.01	07		5. Layanan Hubungan Media	Keluaran :	Jumlah kegiatan hubungan media	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Kegiatan		25,000,000	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	97,805,000
2	16	02	2.01	08		6. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Keluaran :	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	4 Jenis		25,000,000	APBD Kabupaten		4 Jenis	203,754,000
2	16	03			Program	: Aplikasi Informatika		Persentase Terintegrasinya Sistem Infomasi Pelayanan Publik dan Birokrasi		100 %		2,287,765,000			100 %	4,740,000,000

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

2	16	03	2.01		Kegiatan	:	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	:	Persentase layanan nama domain dan sub domain yang dikelola dengan baik		100 %	1,676,000,000	APBD Kabupaten		100 %	2,570,000,000
								Hasil	:	Terkelolanya nama domain di lingkup pemerintah Kabupaten Belitung dan pemerintah desa di Kabupaten Belitung		100 %				100 %	
2	16	03	2.01	01	Sub Kegiatan	1.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Keluaran	:	Nama domain dan penyelenggara sistem elektronik pemerintah daerah	Tanjungpandan	2 Jenis	6,000,000	APBD Kabupaten		2 Jenis	10,000,000
2	16	03	2.01	02		2.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	:	Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Dokumen	30,000,000	APBD Kabupaten			
2	16	03	2.01	03		3.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Keluaran	:	Jaringan intra pemerintah daerah dan internet	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	2 Jenis	1,640,000,000	APBD Kabupaten		2 Jenis	2,500,000,000
2	16	03	2.02		Kegiatan	:	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	:	Persentase layanan sistem pemerintah berbasis elektronik pemerintah Kabupaten Belitung yang dikelola dengan baik		100 %	611,765,000	APBD Kabupaten		100 %	2,170,000,000
								Hasil	:	Terkelolanya sistem pemerintah berbasis elektronik pemerintah Kabupaten Belitung		100 %				100 %	
2	16	03	2.02	01	Sub Kegiatan	1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	:	Dokumen penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Dok	20,000,000	APBD Kabupaten		1 Dok	20,000,000
2	16	03	2.02	02		2.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Keluaran	:	Dokumen perencanaan SPBE	Tanjungpandan	1 Dok	100,000,000	APBD Kabupaten		1 Dok	200,000,000
2	16	03	2.02	03		3.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Keluaran	:	Layanan pusat data dan informasi	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 %	190,000,000	APBD Kabupaten		100 %	850,000,000
2	16	03	2.02	04		4.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Keluaran	:	Sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	2 jenis	35,000,000	APBD Kabupaten		2 jenis	250,000,000
2	16	03	2.02	05		5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Keluaran	:	Dokumen audit infrastruktur dan aplikasi SPBE	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Dok	50,000,000	APBD Kabupaten		1 Dok	200,000,000

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

2	16	03	2.02	06		6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Keluaran : Data Elektronik dan Informasi Elektronik	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Jenis	20,000,000	APBD Kabupaten		1 Jenis	20,000,000
2	16	03	2.02	07		7.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Keluaran : Aplikasi SPBE	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Aplikasi	25,000,000	APBD Kabupaten		2 Aplikasi	200,000,000
2	16	03	2.02	08		8.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Keluaran : Sistem penghubung layanan pemerintah	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Jenis	25,000,000	APBD Kabupaten		1 Jenis	200,000,000
2	16	03	2.02	09		9.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Keluaran : Aplikasi dan ekosistem kabupaten/kota cerdas	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	2 Jenis	116,765,000	APBD Kabupaten		2 Jenis	200,000,000
2	16	03	2.02	11		10.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Keluaran : Sertifikasi GCIO	Tanjungpandan	2 Orang	30,000,000	APBD Kabupaten		2 Orang	30,000,000
2						Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	20					Bidang Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2	20	02				Program	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase Pemanfaatan Data Statistik Daerah		90 %	362,486,940			90 %	404,540,000
2	20	02	2.01			Kegiatan	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Data statistik sektoral		90 %	362,486,940	APBD Kabupaten		90 %	404,540,000
								Hasil : Meningkatnya kualitas data statistik sektoral		90 %				90 %	
2	20	02	2.01	01		Sub Kegiatan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Keluaran : Dokumen statistik sektoral	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	3 Dok	227,486,940	APBD Kabupaten		3 Dok	269,540,000
2	20	02	2.01	02			2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Keluaran : Peserta bimbingan teknis	Tanjungpandan	40 Orang	60,000,000	APBD Kabupaten		40 Orang	60,000,000
2	20	02	2.01	03			3. Membangun Metadata Statistik Sektoral	Keluaran : Dokumen metadata statistik sektoral	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Dokumen	60,000,000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	60,000,000
2	20	02	2.01	04			4. Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Statistik Sektoral	Keluaran : Dokumen kebijakan statistik sektoral	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Dokumen	15,000,000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	15,000,000

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

2				Urusan	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2	21			Bidang Urusan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian													
2	21	02		Program	:	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi		Level II+	138,927,060				Level II+	477,000,000				
2	21	02	2.01	Kegiatan	:	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persandian untuk pengamanan informasi		80 %	138,927,060	APBD Kabupaten			80 %	477,000,000				
							Hasil : Peningkatan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam pengamanan informasi		80 %					80 %					
2	21	02	2.01	02	Sub Kegiatan	1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Laporan monitoring dan evaluasi di bidang keamanan informasi	Tanjungpandan	1 Dok	25,000,000	APBD Kabupaten			1 Dok	27,000,000				
2	21	02	2.01	03		2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Keluaran : Sarana dan prasarana keamanan informasi	Tanjungpandan	4 Jenis	47,927,060	APBD Kabupaten			5 Jenis	300,000,000				
2	21	02	2.01	04		3. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Layanan keamanan informasi pemerintah daerah	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	4 Jenis	66,000,000	APBD Kabupaten			4 Jenis	150,000,000				
JUMLAH										9,316,185,000					13,261,326,000				

BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung tahun 2023. Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 telah disusun dan berorientasi pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam melaksanakan seluruh sasaran-sasaran strategisnya dalam mencapai dan mewujudkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam pembahasan di forum PD dan kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai dan diiringi peran aktif seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Belitung. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Tanjungpandan, Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung,


MOHAMMAD IQBAL, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19641107 200003 1 002